



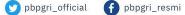
RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS) PGRI MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024-2029

Jakarta, 9 September 2025 Gedung Guru Indonesia Jl. Tanah Abang III No. 24 Jakarta Pusat 10160 **UNIFAH ROSYIDI**

KETUA UMUM PENGURUS BESAR PGRI

PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

Email: pbpgri@pgri.or.id dan pb.pgri@yahoo.com, Website: www.pgri.or.id









AGENDA

- > Agenda Organisasi
- > Program Prioritas
- ➤ Hasil Kasasi
- >ACT ke-39 di Cebu Manila
- >HUT ke-80 PGRI
- ➤ International Seminar on Quality Education for All sekaligus Farewell El Consortium Project, 6 sd 8 Desember 2025
- ➤Informasi Rumah Subsidi
- ➤ Hal-Hal lain yang dianggap perlu

Agenda Organisasi

Jadwal kegiatan organisasi dari September-Desember 2025 :

- a. Evaluasi Jhon Thompson Fellowship 10-17 September di Bangkok.
- b. ACT+1 di Cebu Filipina tanggal 17-21 September 2025.
- c. Regional Forum on Transforming Teachers' and Teaching for Adolecent Health, Well-being, and Gender Equality, 23-25 September 2025, di Bangkok
- d. El Go Public Fund di Lampung 25-27 Sept 2025
- e. Hari Guru Dunia 5 Oktober 2025. Siapkan flyernya.
- f. TALIS OECD 6-8 Oktober 2025 di Singapura.
- g. El Go Public Fund di NTT 10- 12 Okt 2025
- h. El Asia Pacific Conference on Academic Freedom and Democracy, 14-17 October 2025 di India.
- i. El Go Public Fund di Banten 22-25 Okt 2025
- j. Porsenijar di laksanakan di Jabar Bandung, tg 26 sd 28 November 2025
- k. Puncak HUT ke-80 PGRI di Britama Arena pada 29 November 2025
- El Executive Board Meeting (pertemuan tahunan) di Brussels Belgia, 1-5 Desember 2025
- m. International Seminar on Quality Education for All sekaligus Farewell El Consortium Project, 6 sd 8 Desember 2025



PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PENGURUS BESAR

Teachers Association of The Republic of Indonesia
Gedung Guru Indonesia, Jalan Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat Kode Pos 10160 Indonesia
Telp. (021) 3841121, 384985; Fax. (021) 3446504;

Email: pbpgri@pgri.or.id, pb.pgri@yahoo.com; Website: www.pgri.or.id Twitter, Instagram: PBPGRI_OFFICIAL; Facebook: PBPGRI_RESMI_

PERNYATAAN SIKAP PENGURUS BESAR PGRI

Menyikapi dinamika bangsa akhir-akhir ini dan memperhatikan aspirasi para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan anggota PGRI di seluruh Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan sikap sebagai berikut.

1. Memberikan dukungan moral, empati dan solidaritas sebagai sesama anak bangsa terhadap penyampaikan aspirasi mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat yang berjuang untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Bapak Affan Kurniawan, dan beberapa korban lainnya dalam peristiwa yang seharusnya dapat bersama-sama kita cegah. Untuk itu, kami mengajak seluruh anggota PGRI, seluruh guru, pendidik dan tenaga kependidikan mengharapkan bahwa penyampaian aspirasi dilakukan secara konstruktif dan menolak segala bentuk tindakan kekerasan dan anarkis.

PGRI mengajak seluruh guru, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk terus menjaga persatuan, kesatuan, perdamaian, dan kondusivitas bangsa. Perjuangan akan lebih kuat apabila solidaritas ini dibangun dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, dan saling menghormati.

- 2. Kami menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat atas perhatianya pada dunia pendidikan, kualitas, perlindungan, dan kesejahteraan guru baik guru negeri maupun swasta, guru ASN maupun honorer. Semoga pemerintah senantiasa memprioritaskan akses dan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan 20 % anggaran pendidikan hanya untuk pendidikan termasuk mendorong penghargaaan sertifikasi guru dalam batang tubuh RUU Sisdiknas yang saat ini tengah dibahas di Parlemen.
- PGRI mengajak seluruh anggota, guru, pendidik dan tenaga kependidikan untuk tetap fokus melaksanakan tugas mulia mengajar dan mendidik serta melayani anak didik dengan penuh asah, asih, dan asuh, serta menghormati perbedaan.
- 4. Pengurus Besar PGRI menghimbau para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk aktif membuat narasi dan konten yang positif di media sosial menguatkan persatuan, menyerukan kedamaian, dan mendukung upaya pemerintah dan semua pihak dalam menjaga ketenangan masyarakat. Media sosial hendaknya menjadi ruang edukasi, inspirasi, dan pemersatu bangsa.

Pengurus Besar PGRI percaya bahwa menyuarakan pendapat melalui dialog yang sehat, konstruktif, adil, dan konsisten menjadi bagian penting dalam memahami permasalahan

bangsa untuk dapat segera diselesaikan. Mari bersama-sama kita terus berjuang dengan cara yang bermartabat demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Kami juga percaya bahwa Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan adil, bijaksana, dan menghormati semua pihak.

Jakarta, 1 September 2025
PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

Ketua Umum,

Pr Description: A picture containing indoor

NF Description automatically generated

Sekretaris Jenderal,

Dudung Abdul Qodir, M.Pd.

PA 10080700522

PENGURUS



RAPIMNAS I PGRI Tahun 2025



PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

Jalan Tanah Abangili No.24Jakarta PusatKodePos10160 Telp. (021) 3841121. 3849856. Fax. (021) 3446504 Nomor: 597/Um/PB/XXIII/2025

12 Agustus 2025

Lampiran

: 1 (satu)

Perihal

: Usulan PGRI tentang RUU Sisdiknas

Yang terhormat, Kepala Badan Cq Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Senayan, Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan usulan Pengurus Besar PGRI tentang di Rancangan Undang-Undang (RUU) Sisdiknas. Mengingat metode penyusunan RUU Sisidiknas adalah Kodifikasi dari Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Perguruan Tinggi, sementara yang terkait dengan pendidikan menyangkut banyak Undang-Undang, kami mohon perhatian beberapa hal yang urgen yaitu antara lain:

- Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Guru Daerah Terpencil mohon tetap ada dalam batang tubuh UU Sisdiknas
- Organisasi Profesi Guru sebaiknya disebut Organisasi Profesi Pendidik, karena Guru, Dosen, dan pendidik lainnya adalah Pendidik. Setiap Pendidik wajib menjadi anggota Organisasi Profesi.
- Anggaran Pendidikan 20 % APBN dan 20 % APBD berada dalam batang tubuh UU Sisdiknas digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan pendidikan di Kementerian Pendidikan di luar biaya pendidikan Kedinasan dan K/L yg memiliki fungsi pendidikan.

Ketiga hal tersebut kami mohonkan untuk menjadi prioritas dalam batang tubuh RUU Sisdiknas. Sedangkan usulan lainnya kami sertakan dalam lampiran.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Usulan RUU SISDIKNAS

Hasil Kasasi

Akan disampaikan oleh Tim LKBH

Anggota LKBH

SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS LEMBAGA KONSULITASI DAN BANTUAN HUKUM PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024-2029

Pembina : Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.

(Ketua Umum Pengurus Besar PGRI)

Ketua : Abdul Waseh, S.Pd., MA.

Wakil Ketua I : Dr. Didi Suprijadi, M.M.

Wakil Ketua II : Dr. Samuel Haning, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris : Maharani Siti Shopia, S.H., M.H.

Anggota : 1. Harun Nyak Atim Abu, S.H., M.H.

Drs. Siswaji, M.Pd.

Irman Yasin Limpo, S.H.

4. H. Abdul Haliem Soebri, S.H.

Esih Sugiarsih SH, M.H.

6. Nur Hadi, SH., M.H.

Meylinda A Siregar, S.HI.

8. Dominikus Nitsae, S.Pd

HUT KE-80 PGRI

- ➤ Diadakan pada 29 November 2025 di Britama Arena pukul 13.30 WIB. Acara sudah dimulai dari pkl 09.00 WIB dan ada berbagai pertunjukkan pra acara, pemberian anugerah, dan berbagai bazaar.
- ➤ Anugerah Dwija Praja Nugraha untuk Gubernur/Bupati/Walikota.
- Anugerah Guru Berdedikasi : diajukan dengan portofolio. Guru TK/RA, SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK/MAK Negeri dan Swasta. SLB dari SD-SMP-SMA.
- Anugerah Kepala Sekolah, Pengawas sekolah, Dosen di lingkungan PT PGRI.
- ➤ Anugerah untuk admin SIK

Tiket PP ditanggung oleh PGRI setempat yang mengusulkan dan kerja sama dengan dinas terkait. (Surat edaran belum dikirim)

➤ Peserta berjumlah 9.000. Pembagian kuota menyusul.

Program Prioritas

- 1. Mohon dibaca dengan cermat program prioritas dan anggaran
- 2. Efisiensi harus dilakukan menjaga Kesehatan organisasi
- 3. Program prioritas yang utama Adalah tercapaiknya 10 program prioritas organisasi.
- 4. Sumber pendpatan utama organisasi dari iuran, yang setiap waktu ditagihkan dan dikoordinir oleh task force peningkatan iuran.
- 5. Dalam tiap tahun ada anggaran-anggaran yang diluar rancangan yakni persoalan hukum, berbagai kegiatan yang sidaftnya incidental.
- 6. Tiket undangan ke daerah dibayarkan langsung kepada travel . PB PGRI tidka menyediakan tiket, hanya diberikan uang harian sesuia standar tarif yng insya allah tidak lebh kecil dr standar tarif yg ditetapkan pemerintah.
- 7. Dengan berakhirnya program El Consortium Project, maka setiap Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa ditambahkan 1 hari untuk kegiatan mandatori khususnya keanggotaan dan iuran. Biaya konsumsi ditanggung oleh PB PGRI dengan narasumber dari PB PGRI

| | | | | | | AG | ENI | DA P | ENG | GUR | US | BE | SAR | R PG | RI 1 | TAHU | IN 2 | 025 | (M/ | ARET | -DE | SEN | 1BE | R) | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|--------------------------------|------|-------------------|--------------|--------|------------------|--------------|---------------------|--------|--------------------|-----|------|----------------------|---|----------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| DATE / MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MARCH | | M RAMADHAN | | | | | | | M RAMADHAN M | | | | | | | м | RAMADHAN | | | | | | M RAMADHAN | | | | | | | М | |
| APRIL | Idul Fitri Holiday | | | | | | | | | | | М | | | Bil & PB intation | | Good Friday | | м | | | | | El Pra Monev | | м | | | | | |
| MAY | May Day | | | м | | | | | | | м | Vesak Day | | | Rep Instrur | lonev & porting ment Dvpt ceting | | м | | | | | | | Σ | | | | Ascensi on Day | | _ |
| JUNE | Pancas Ila Day | | | | | ldul Adha | | н | | | | | | | м | | | | Perempuan PGRI | | | М | Full day Workshop everlanter | | | Rapimnas PGRI | & El Go Public Start | PGRI Orientation | | | |
| JULY | | | | | | м | F | | Moni | itoring | to Ben | gkulu | н | | | | med | sing eting uator | | м | | PGRI | | 1onitori: | ng to Di | | м | MTE | | Audensiä PublicSemhar Ball | Monittoding Ball |
| AUGUST | Monitoring to M PORSENASMA | | | | | | | | | M Monitoring to | | | | | ontalo HUTRI | | | | Audénsi & Public Sembar Sultana | Sultand Monitoring to Suffering | | | ACRES LOCKET BERN SHIPPERS HIT | | | | Monitoring to Kalbar | | | bar | м |
| 8EPTEMBER | | | Audensi & Public Seminar | Moni | toring t Tenga | to Jawa h | М | | | | | | | | | | | | | ACT | | | | Audensi & Public Sembar | | nitorin; ampun | | М | | | |
| OCTOBER | Monitoring to Kalimantan | | | | | | | | | Monitoring to NTT M | | | | | Monitoring to Kepri | | | | М | Audiensi & Public Sentine | | | Monitoring to Banten | | | Monitor | | toring to Babel | | | |
| NOVEMBER | VEMBER Persiapan PORSENIJAR dan HUT PGRI Persiapan PORSENI JAR dan HUT PGRI Persiapan PORSENI JAR dan HUT PGRI | | | | | | | | | | | Exe Board Bruss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECEMBER | | | | | | | | Go Pub EPM 20 | | d Edu | | | | | | | | | | | | | | 1 | Mas Iday | | | | | | |
| Remarks: | | Sunda | у | | | Public | Holida | у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1-7 Apr 2025 = 6 Idul Fitri Holiday 18 Apr 2025 = 6 = Good Friday

1 May 2025 = C = Good Friday 1 May 2025 = May Day 12 May 2025 29 May 2025 1 June 2025 6 June 2025 Waisak Day Holiday

Ascension Day of Jesus
 Pancasila day

= Idul Adha holiday

27 June 2025

17 August 2025

5 September 2025 25 December 2025 Islamic New Year
 Independence Day

Maulid Prophet Muhammad SAW

2025 = Christmas Holiday

Berganti Posisi

Pasal 39 ayat (6) untuk tingkat Pengurus Besar PGRI

F2 terpilih setelah 2 (tahun) melaksanakan tugas dapat berganti posisi dari Ketua menjadi Sekretaris Jenderal dan sebaliknya yang **diputuskan dalam rapat pleno Pengurus Besar PGRI** dan disahkan dalam Konferensi Kerja Nasional.

Pasal 43 ayat (7) untuk tingkat PGRI Provinsi/Daerah Istimewa

F2 terpilih setelah 2 (tahun) melaksanakan tugas dapat berganti posisi dari Wakil Ketua menjadi Sekretaris Umum dan sebaliknya yang **diputuskan dalam rapat pleno Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa** dan disahkan dalam Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa.

• Pasal 46 ayat (7) untuk tingkat PGRI Kabupaten/Kota

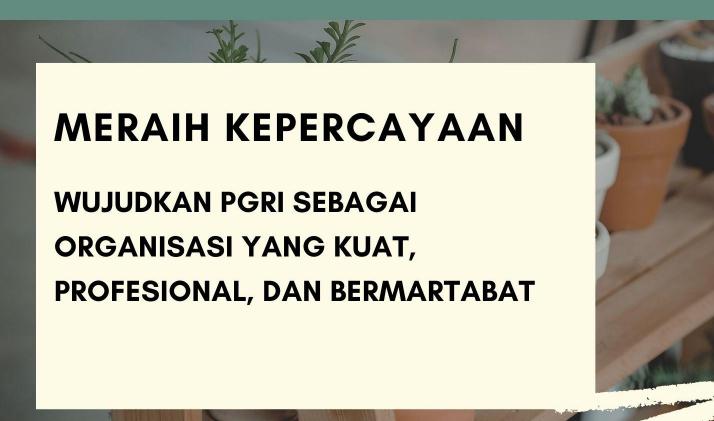
F2 terpilih setelah 2 (tahun) melaksanakan tugas dapat berganti posisi dari Wakil Ketua menjadi Sekretaris dan sebaliknya yang **diputuskan dalam rapat pleno Pengurus PGRI Kabupaten/Kota** dan disahkan dalam Konferensi Kerja Kabupaten/Kota.

Pasal 49 ayat (7) untuk tingkat PGRI Cabang/Cabang Khusus

F2 terpilih setelah 2 (tahun) melaksanakan tugas dapat berganti posisi dari Wakil Ketua menjadi Sekretaris dan sebaliknya yang **diputuskan dalam rapat pleno Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus** dan disahkan dalam Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus.

TANTANGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL:

- PERTENGAHAN TAHUN 2023 -2024 2025 TAHUN YANG SANGAT BERAT
- PGRI DI BOMBADIR DARI DALAM DAN DARI LUAR
- DITINGGALKAN SEKALIGUS DICARI...
- BANYAK PENUMPANG GRATIS: FREE RIDERS...
- PRINSIP MENJAGA DENGAN INTEGRITAS, KOMITMEN DAN KETULUSAN
- MEMPERJUANGKAN HONORER ADALAH JALAN YG DITEMPUH DENGAN KESADARAN PENUH, MESKI BANYAK KERIKIL MENGHALANGI
- KADERISASI DAN KEPEMIMPINAN
- PRINSIP COLLECTIVE COLLEGIAL HANYA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PIMPINAN ORGSNISASI TERTINGGI HAMPIR TIDAK DIBERI KEWENANGAN DALAM MEMIMPIN
 - PERLINDUNGAN HUKUM YANG LEMAH, PERLUNYA UU PERLINDUNGAN GURU
- TATA KELOLA GURU CARUT MARUT- OTONOMI DAERAH PLUS MINUS; KAJIAN SERIUS RUU SISDIKNAS
- MINIM DAN TERBATASNNYA PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KAPABILITAS GURU
- IURAN TIDAK LANCAR, MENJADI BEBAN ORGANISASI DI SEMUA TINGKATAN
- PEJABAT YANG MENGELOLA GURU MENDAGRADASI PGRI PERMENDIKBUD NO. 87
- TARGET REKRUITMEN ANGGOTA BARU 95 % TERSEOK-SEOK KRN KEBUNTUAN SOAL IURAN
- LEADERSHIP DI SEMUA TINGKATAN BELUM MERATA
- HASIL-HASIL PERJUANGAN BELUM DIPAHAMI SEMUA
- INTERVENSI TERHADAP ORGANISASI PROFESI NYATA DG KELUARNYA PERMENDIKBUD NO. 85 MENGENAI FASILITASI ORGANISASI PROFESI
- MANY MORE



HOW DO PEOPLE TRUST YOU?

MEMAHAMI, MENJAGA, MERAWAT, MENUMBUHKAN

- SOLIDITAS TERJAGA DENGAN BAIK
- FORUM-FORUM ORGANISASI TERLAKSANA DENGAN TERTIB
- KESADARAN BERSAMA MENGHADAPI TANTANGAN
- TUMBUHNYA GELOMBANG KELOMPOK MUDA DI PGRI
- KEKUATAN /KELEMAHAN MEDSOS
- PENGAKUAN DUNIA INTERNASIONAL YANG KUAT
- KEWIBAWAAN PEMIMPIN
- MELAKSANAKAN PERAN ADVOKASI SECARA KONSISTEN
- MEMBANGUN KEPERCAYAAN STAKEHOLDERS
- MANY MORE

APA YANG HARUS DILAKUKAN?

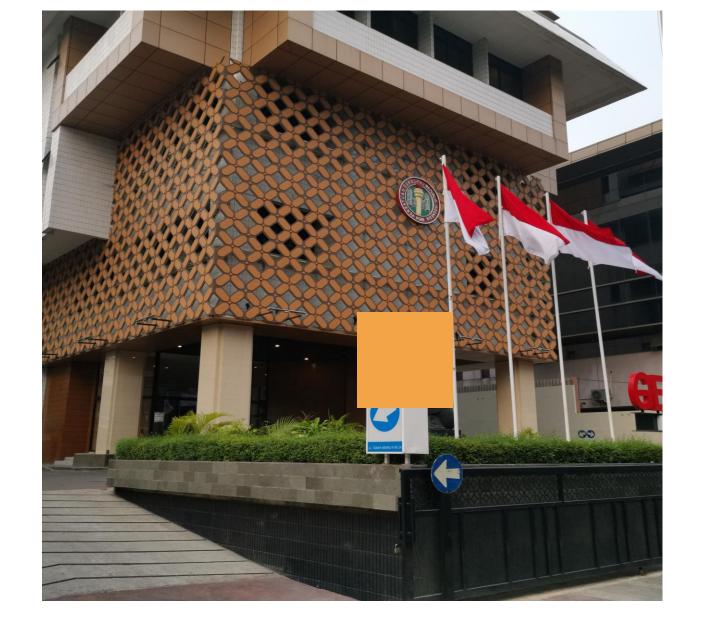
- 1. Meraih Kepercayaan...
- 2. Berperan aktif dan strategis sebagai Mitra pemerintah dan pemda
- 3. Mengedepankan dialog, mengubah mindset dari hard power menjadi soft power
- 4. Berkhidmat pada khitah organisasi profesi pendidik dengan mengubah menjadi kekuatan moral intelektual daripada menjadi pressure power
- 5. Melakukan reformasi digital dan inovasi
- 6. Memberdayalan potensi segala usia

RUMAH KITA: MENATA DIRI, MEMBUKA RUANG DIALOG, MEMBUKA SEKAT ...





Bangunan asli GGI yang sudah tampak kumuh, tak bertuan, lift tidak jalan, dan daya utilisasi sangat lemah



Gedung Guru Indonesia (GGI), Kantor PB PGRI, Jl. Tanah Abang III No. 24 Jakarta Pusat Telah resmi menjadi milik PGRI setelah melalui perjuangan berliku, pengurusannya mulai dari RT RW sampai ke Kementrian Pertanahan dan Kemensos. Albamdulilah

Program Prioritas PB PGRI 10 Progam Mandatori



10 PROGRAM MANDATORI PGRI

- 1. Transformasi dan Digitalisasi Organisasi
- 2. Peningkatan Profesionalitas, Perlindungan, dan Kesejahteraan Guru
- 3. Pengelolaan Keanggotaan
- 4. Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan
- 5. Kaderisasi, Kepemimpinan, dan Peningkatan Kinerja Pengurus
- 6. Konsolidasi dan Efektifitas Forum Organisasi
- 7. Peningkatan Kerja Sama dan Pengemba<mark>n</mark>gan Usaha
- 8. Penataan dan Penguatan Lembaga Pendidikan PGRI
- 9. Pemberdayaan Perempuan, Advokasi, dan Kampanye Isu-Isu Aktual Pendidikan
- 10. Pembangunan dan Pengelolaan Kantor, Peraturan Organisasi, dan Penataan Perangkat Kelengkapan Organisasi



1. Transformasi dan Digitalisasi Organisasi (MODERNISASI ORGANISASI)

- Pembentukan PGRI Smart Learning and Character Center (PSLCC) di semua tingkatan.
- Perancangan berbagai pelatihan online dilakukan dalam peningkatan kompetensi guru
- Layanan pendampingan khusus guru DAN HONORER
- Penyelesaian guru honorer yang adil dan merata
- Pengawalan dan kejelasan system karier guru, kasek, pengawas, dosen
- Kejelasan masa depan GTK
- Efisiensi dan inovasi, forum-Forum organisasi bersifat nasional dilakukan dengan daring.
- Penataan dan pembelaan Lembaga Pendidikan PGRI

TRANSFORMASI PGRI

1

STRUKTUR



Perkembangan struktur yang bersifat organic(Tom Burns dan Stalker) disamping yang mekanistik seperti Lembaga kajian, SLCC, APKS, dan Perempuan PGRI). Penguatan IGTKI PGRI, lembaga pendidikan PGRI dari PAUD sampai perguruan tinggi. Proses dan prosedur sebagai organisasi modern 2

KULTUR



organisasi harus menyesuaikan dengan ekosistem global, nasional dan local (bersifat inklusif, growth mindset,kolaboratif. Kids dan sifat unitaristik, independent dan non partisan 3

ORANG/PEOPLE



pengurus harus memiliki jiwa kepemimpinan yang mengayomi, cerdas, tegas, memiliki komitmen moral yang kuat, bertanggung jawab dan patuh pada organisasi. Soliditas dan solidaritas menjadi pengikat yang kuat antara pengurus dengan anggota. 4

TEKNOLOGI



melakukan modernisasi organisasi, menuju digitalisasi organisasi, mengembangkan profesionalisme guru dan anggota melalui perluasan teknologi untuk memperluas akses mutu dan layanan

JEJAK PERJUANGAN PGRI TERHADAP HONORER DAN HASILNYA ...

PGRI AKAN SELALU BERJUANG UNTUK KEADILAN DAN MARTABAT GURU DAN HONORER

DI TINGKAT INTERNASIONAL, PGRI SANGAT DIHARGAI PERJUANGANNYA TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU DAN HAL-HAL LAIN TERKAIT DENGAN GURU DAN PENDIDIKAN

Indonesia Darurat Kekurangan Guru, Save Honorer. Pastikan kejelasan Statusnya, ASN PPPK atau ASN Murni

- Perjuangan honorer adalah perjuangan panjaang PGRI DI SEMUA TINGKATAN sebagai penghormatan terhadap marwah guru dan PGRI
- PP NO. 48 tahun 2005 melarang Kepala Daerah Mengangkat tenaga Honorer.
- Terbit UU No. 5 tahun 2014 TENTANG ASN tanggal 15 Januri 2014. Tidak ada lagi pengangkatan PNS tanpa tes,. ASN TERDIRI DARI DUA KATAGORI, ASN PNS DAN ASN P3K.
- dalam berbagai kesempatan, perjuangan pGRI tentang honorer dibagi dalam dua tahap. Perjuangan jangka panjang yaitu perubahan UU ASN dan perjuangan jangka pendek adalah penyelesaian honorer K dan Non K.
- Tahun 2018 Pemerintah menyatakan kekurangan guru 1.009.920 guru, dan pensiun setiap tahun 70.000.
- Guru Honorer yang lulus sangat sedikit, PGRI memperjuangkan penurunan skor PG, dan diterima sehingga jumlah yang lulus meningkat signifikan.

| | terbitnya SK hingga akhirnya terbit. |
|---|--|
| | Jumlah Guru honorer Usia diatas 35 tahun sangat kecil, PGRI memohon |
| | penundaan pengumuman dan memberikan tambahan afirmasi |
| | mempertimbangan usia dan masa kerja melalui Kemdikbudristek, |
| | KemenpanRB, dan Komisi X DPR RI. Dari semula yang lulus 67.000 guru |
| | menjadi 293.860 di tahun 2021. sementara 193.954 lulus Passing Grade/PG |
| | belum dapat formasi, dan 437.823 belum PG. |
| | Februrai 2022 Saat Peserta Seleksi lulus dan dapat formasi menunggu |
| | Penetapan Nomor Induk P3K, BKN mengumumkan bahwa Guru Honorer |
| | Bermasa kerja kurang 3 tahun tidak dapat diangkat. |
| | |
| _ | |
| | PGRI menolak karena dalam persyaratan seleksi tidak ada syarat minimal |
| _ | PGRI menolak karena dalam persyaratan seleksi tidak ada syarat minimal masa keria 3 tahun. melalui Pansel. komisi X. dan BKN. Maret 2022 BKN |
| _ | masa kerja 3 tahun, melalui Pansel, komisi X, dan BKN. Maret 2022 BKN |
| _ | masa kerja 3 tahun, melalui Pansel, komisi X, dan BKN. Maret 2022 BKN mengeluarkan kebijakan syarat masa kerja minimal 3 tahun tidak berlaku |
| _ | masa kerja 3 tahun, melalui Pansel, komisi X, dan BKN. Maret 2022 BKN |
| | masa kerja 3 tahun, melalui Pansel, komisi X, dan BKN. Maret 2022 BKN mengeluarkan kebijakan syarat masa kerja minimal 3 tahun tidak berlaku |
| _ | masa kerja 3 tahun, melalui Pansel, komisi X, dan BKN. Maret 2022 BKN mengeluarkan kebijakan syarat masa kerja minimal 3 tahun tidak berlaku bagi P3K Guru. |
| _ | masa kerja 3 tahun, melalui Pansel, komisi X, dan BKN. Maret 2022 BKN mengeluarkan kebijakan syarat masa kerja minimal 3 tahun tidak berlaku bagi P3K Guru. Ketika rekruitmen CPNS tanpa kejelasan honorer, PGRI meminta penundaan |
| _ | masa kerja 3 tahun, melalui Pansel, komisi X, dan BKN. Maret 2022 BKN mengeluarkan kebijakan syarat masa kerja minimal 3 tahun tidak berlaku bagi P3K Guru. Ketika rekruitmen CPNS tanpa kejelasan honorer, PGRI meminta penundaan rekruitmen CPNS di tunda, TERBITLAH PP PPPK NO. 49/2018 disampaikan oleh |

| PGRI mendesak agar seleksi P3K Guru dilakukan Kembali tahun 2022 dengan memenuhi formasi guru yang dibutuhkan (1 Juta). Usulan PGRI agar tes dilaukan oleh Pemda dengan menekankan aspek kinerja pembelajaran dan tidak terlalu bersifat akademis dikabulkan |
|--|
| Februrai 2022 Saat Peserta Seleksi lulus dan dapat formasi menunggu Penetapan Nomor Induk P3K, BKN mengumumkan bahwa Guru Honorer Bermasa kerja kurang 3 tahun tidak dapat diangkat. PGRI menolak karena dalam persyaratan seleksi tidak ada syarat minimal masa kerja 3 tahun, melalui Pansel, komisi X, dan BKN. |
| Maret 2022 BKN mengeluarkan kebijakan syarat masa kerja minimal 3 tahun tidak berlaku bagi P3K Guru. |
| HUT PGRI ke 77 di Semarang Jawa Tengah, Mendikbudristek dihadapan Presiden dan PGRI Se Indonesia menyampaikan kebijakan bahwa tahun 2023 akan dilakukan seleksi P3K Guru dan apabila Pemda belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan hingga kahir Maret, maka Pemerintah Pusat akan menetapkan kekurangan formasi masing-masing Pemda, sehingga terpenuhi kekurangan guru sebanyak 1 Juta yang semua anggaran Gaji P3K dipenuhi oleh APBN. Kita Kawal dukungan pak Mendikbud tersebut. |
| PGRI Akan terus mengawal perjuangan Honorer untuk terpenuhinya kebutuhan, kesejahteraan, dan martabat guru Indonesia secara adil dan berkesinambungan. |
| PGRI Menoak penundaan pengangkatan Honorer yg telah lulus (kasus thn 2024). Pelopor perjuangan PGRI Kabupaten Bekasi. |
| Perjuangan permohonan REVISI UUASN. Contoh Pengembalian guru swasta yg sdh asn ditugaskan di sekolah swasta, bukan hanya permen. |
| Kejelasan karir guru yang berbelit. |
| Rekruitmen Kasek tidak lagi diskriminatif hanya GP. PPPK Mempereolah hak yang sama untuk menduduki jabatan kasek dsb. |
| |

Rekapitulasi Data Kelulusan PPPK

Kelulusan Tahun 2021: 250.432

Kelulusan Tahun 2022: 293.860

Kelulusan Tahun 2023: 250.320

Total: 794.612

INI PERJUANGAN PGRI MENUNTASKAN KEBUTUHAN GURU. DISEPAKATI 1000.000 KEKURANGAN GURU AKAN DIISI PPPK.

KENDALA: TIDAK SEMUA PEMDA WELCOME PADA PENGISIAN KEKUARANGAN GURU TERSEBUT. BANYAK JUGA KEBERATAN TERHADAP



Home Sekolah Perguruan Tinggi Beasiswa Edutainment Seleksi

Update Jumlah Pendaftar PPPK 2024, Pelamar PPPK Guru Sudah Berapa Orang?

Sementara PPPK Guru ada di angka 233.669 pelamar dan PPPK Nakes sebanyak i orang.

Lebih jelasnya, berikut data lengkap jumlah pelamar terkini PPPK tahun 2024:

Statistik Terkini Pendaftar PPPK 2024 PPPK Guru 2024

Daftar: 233.669

Submit: 68.525

Verif Memenuhi Syarat (MS): 19.579

Verif Tidak Memenuhi Syarat (TMS): 1.175

CATATAN PPPK GURU/ problema yang memerlukan pemahaman

- 1. Tidak ada informasi dan kejelasan periode penarikan data Dapodik oleh SSCASN. Temuan, masih banyak data guru masih di satminkal lama.
- 2. Masih ada beberapa kode kualifikasi akademik yang tidak terbaca di portal SSCASN.
- 3. Alur pendaftaran tidak konsisten dengan Permenpan RB No. 28 tahun 2021 Pasal 29 ayat 2 huruf a, b, dan c. Dimana banyak guru honorer di sekolah induk yang membuka formasi tidak bisa melamar formasi yang linear dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik S1 di sekolahnya yang merugikan guru di sekolah Induk.
- 4. Masih banyak NIK dan Ijazah hasil verval tidak sesuai dengan yang terbaca di SSCASN.
- 5. Masih banyak data THK-II yang tidak terbaca di SSCASN.
- 6. Informasi yang diberikan oleh admin gurupppk.kemdikbud yang tidak sejalan dengan Permenpan RB No. 28 tahun 2021.
- 7. Terlihat kurangnya komunikasi antara pihak Kemdikbudristek dan BKN terkait alur pendaftaran, hal itu terlihat di sesi tanya jawab baik di portal resmi dan IG BKN yang saling lempar permasalahan.
- 8. Masih ada guru yang telah tidak mengajar dapat mengikuti seleksi ASN PPPK Guru.
- 9. Guru honorer di sekolah negeri tersisihkan oleh peserta yang berada di bawah naungan Yayasan, dimana Sebagian besar memiliki sertifikat pendidik.

CATATAN PPPK GURU, Problema.....

- 10. Tenaga kependidikan bisa lolos seleksi administrasi, mengikuti seleksi ASN PPPK Guru 2021 dan lulus.
- 11. Tombol reset masih menyisakan permasalahan terkait formasi yang dilamar di sekolah induk.
- 12. Pengumuman titik lokasi dan waktu/jadwal pelaksanaan tidak sesuai surat edaran dan menimbulkan kegaduhan di kalangan peserta serta menimbulkan beberapa peserta tidak mengikuti seleksi sesuai dengan sesi yang telah dijadwalkan.
- 13. Bocornya file result (FR) sesi 1 di hari pertama sehingga merugikan peserta di sesi berikutnya.
- 14. Masih ada peserta yang hak afirmasi usia tidak terhitung, meskipun sudah disanggah dan diserta dokumen pendukung di tahap I.
- 15. Formasi di tahap 2 banyak diisi oleh guru pemilik sertifikat pendidik yang mengajar di sekolah swasta.
- 16. Menimbulkan persoalan baru, terjadi migrasi besar-besaran guru yang lulus seleksi ASN PPPK Guru dari persekolah swasta ke sekolah negeri, sehingga terjadi kekosongan guru.
- 17. Perlu adanya evaluasi secara mendalam dan menyeluruh terkait seleksi ASN PPPK Guru 2021. Semisal pemberian afirmasi berdasarkan masa kerja, penempatan lulusan dll.

CATATAN PPPK GURU, Probleme.....

- 18. Seleksi ASN PPPK Guru 2021 secara prinsip melenceng dari tujuan awal untuk menuntaskan harkat, martabat, kesejahteraan dan perlindungan Guru honorer di sekolah negeri.
- 19. Harus adanya penegasan terkait dengan definisi honorer guru di sekolah negeri dengan guru tetap Yayasan sebagai peserta seleksi.
- 20. Hasil seleksi ASN PPPK Guru 2021 yang telah di laksanakan 2 tahap menimbulkan persoalan baru, terjadinya migrasi guru di bawah Yayasan dan organisasi yang memiliki persekolahan.
- 21. Peserta seleksi ASN PPPK Guru 2021 yang dinyatakan lulus dan berasal dari sekolah swasta dengan status bukan pegawai tetap serta penghasilan yang jauh dari sejahtera ditempatkan di sekolah asalnya.
- 22. Tidak ada honorer per 31 Desember 2024
- 23. ASN PPPK mendapatkan pensiun (UU ASN Bab IV Pasal 21 ayat 6), Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial (UU ASN Bab V Pasal 14-18).
- 24. Guru ASN PPPK bisa ditugaskan di Sekolah Swasta (Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025)

2. Go public fund education campaign launching in Indonesia: Public Seminar on Teacher's welfare and quality education in Indonesia.



Penataan dan Penguatan Lembaga Pendidikan PGRI

- Tata Kelola Lembaga pendidikan PGRI dibenahi
- AD/ART /PO disiapkan
- Kepala sekolah di SK kan oleh YPLP Pusat atas persetujuan Ketum PB PGRI dengan terlebh dahulu didasarkan atas usulan dari sekolah/BPH sekolah, Kabupaten I\kota dan Provinsi dn dirapatkan bersama dengan YPLP dan Pengurus Besar PGRI.
- Tidak boleh aset berpindah tangan pada perseorangan, asset adalah asset orgnaisasi yang dikelola dan dimanfaatkan oleh pengurus
- dll

Hal-hal lain yang dianggap perlu

- PORSENI
- DANA SOSIAL
- PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PRESTASI BERMASALAH
- ISU-ISU AKTUL TERKAIT DENGAN: Usulan UU Perlindungan Guru, Peta jalan pendidikan, RUU Sisdiknas, kurikulum Merdeka, Ujian Nasional, SPMB, sertifikasi guru, jam mengajar 24 jam diubah menjadi 18 jam, system karisi guru, TPG langsung ke rekening guru, digitalisasi dalam pendidikan, inovasi dan serbuan Al

PERJUANGAN PGRI sebelum dan SESUDAH di ERA PANDEMI

- Sertifikasi guru dan TPG
- Desentralisasi kenaikan pangkat ke daerah
- Penyederhanaan pembayaran TPG semula 3 hri dan Umroah tdk dibayarkan dpt dibayarkan.
- Perpres No.,98 tahun 2020 tentang Penggajian PNS PPPK
- Relaksasi Bos, dan dimafaatkan untuk kepentingna BDR dan guru honorer
- Mengawal TPG tidak dipotong di Era Pandemi
- Mengawal THR dan Gaji ke 13 di era pandemi
- · Membuat PGRI Crisis Center hingga kabupaten kota
- Berbagai pelatihan tentang PJJ
- · Mengusulkan kurikulum sederhana yang realistis, dan kini jadi pilihan
- Menolak Mapel Sejarah dihapus dan Pendidikan Agama diintegrasikan pada PPKN
- Penghapusan Klaster Pendidikan dalam UU Cipta Kerja,
- Subsidi pemerintah Rp. 600.000 untuk Honorer, dg masuk BPJS Ketenakakerjaan
- Pengangkatan CPNS PPPK Guru K2 yang teah lulus tes
- Bantuan Pemrintah/ pemerintah daerah thd guru dan tenaga adminsitrasi honor
- Bantuan pulsa siswa, mahasiswa, guru, dosen, tidak bergabung POP
- Mengusulkan Guru, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk prioritas divaksin
- Deregulasi thd tugas-tugas guru seperti 24 jam tatap muka, kewajiban absensi dengan dating ke sekolah
- Efektivitas dana Bos dengan memberikan ruang untuk kebutuhan PJJ dan honorer
- TPG DIBAYAR LANGSUNG ke Rekening Guru
- Penyelesaian system Pemnerimaan Mahasiswa Jalur Prestasi
- Penyelesaian guru yang belum Si dan D4.
- Pengangkatan kasek adil bagi semua tidak terbatas pd GP.
- Pencairan TPG langsung pd guru, tepat waktu tepat jumlah.
- Pengangkatan guru honorer hingga tahun 2024: 774. 999 dari rencana 1 juta pwgangkatan honorer menjadi ASN PPPK

ORGANISASI



DICINTAI ANGGOTANYA... DISEGANI MITRANYA...

DIAKUI MASYARAKAT.... DIRINDUKAN KEHADIRANNYA.....